



# Masuk Zona Hijau Diapresiasi Pempus

## Realisasi APBD 2021

**PONTIANAK** - Realisasi pendapatan dan belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 mendapat apresiasi yang cukup baik dari pemerintah pusat. Realisasi pendapatan Kalbar berada di peringkat ke-15, sementara realisasi belanja berada di peringkat 10.

Hal itu bisa dilihat dari data yang dikeluarkan Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri tentang persentase realisasi pendapatan dan belanja APBD provinsi se-Indonesia tahun anggaran 2021.

Realisasi pendapatan Kalbar yang berada di peringkat 15 masih berada di zona hijau, dengan capaian 99,91 persen. Sedangkan untuk realisasi belanja, Kalbar berada di peringkat 10 dengan realisasi 92,01 persen. Dengan berada di urutan ke-10 nasional, artinya Kalbar sudah lebih baik dari 24 provinsi di urutan bawahnya.

Sambungan dari halaman 9

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Kalbar Sutarmidji mengatakan bahwa apa yang sudah dicapai menunjukkan kinerja APBD Kalbar sudah baik. Karena selain itu, di tahun yang sama nilai *monitoring center for prevention* (MCP) Kalbar juga mengalami peningkatan.

"Kalau tahun lalu (2020) capaiannya 83,67 maka tahun ini (2021) 89,97, MCP ini penilaiannya oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," terangnya.

Meski demikian ia mengaku belum cukup puas dengan nilai MCP yang diraih itu. Ia menargetkan di tahun berikutnya nilai MCP Kalbar harus sudah di atas 95. "Angka ini (95) tidak sulit untuk dicapai, karena beberapa aturan perlu segera dibuat," ucapnya.

Sementara untuk persoalan anggaran, Midji sapaan karibnya berharap kinerja perangkat daerah

ah bisa lebih maksimal. Dimana di tahun 2023, untuk APBD dirinya mengarahkan tidak lagi membagi pagu-pagu ke perangkat daerah. Melainkan perangkat daerah yang harus menyusun program terlebih dahulu berdasarkan Musrenbang.

"Baru Bappeda koreksi program mana saja yang sesuai atau menunjang RPJMD serta ada dalam pembahasan Musrenbang dan mempunyai daya ungkit lebih besar dan luas," harapnya.

Midji juga berharap agar sumber-sumber pendapatan daerah bisa dimaksimalkan. Sekaligus jangan sampai ada kebocoran-kebocoran. Termasuk untuk persoalan aset, semuanya harus diberdayakan secara maksimal. "Saya optimis realisasi pendapatan akan melampaui target dan belanja akan lebih cepat dan terarah," tegasnya.

Di tahun 2023, belanja pemerintah bakal difokus-

kan pada beberapa hal. Seperti pendirian dan penambahan ruang belajar SMA/SMK. Dengan tujuan agar bisa meningkatkan angka harapan lamanya belajar. Kedua fokus pada belanja infrastruktur, khususnya jalan. "Kalau infrastruktur kesehatan saya rasa sudah lebih 95 persen tersedia dengan baik, karena tahun anggaran 2021 tuntas kami bangun," katanya.

Infrastruktur kesehatan itu bisa dilihat dari pembangunan RSUD Soedarso yang telah tuntas. Di antaranya ada gedung rawat inap dan operasi dengan enam lantai masing-masing dua gedung. Ada ruang atau instalasi hemodialisa, ruang rawat inap untuk penyakit infeksius dan instalasi radiologi yang standar. "Sarana prasarana pemerintahan juga sudah cukup baik dengan ruang standar proses (protokol kesehatan)," pungkasnya. **(bar)**